

LAMPIRAN : SALINAN PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 32 TAHUN 2022  
TANGGAL : 1 April 2022

---

RENCANA STRATEGIS BISNIS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PENGELOLAAN PERPARKIRAN  
TAHUN 2022-2026

## LAPORAN AKHIR

# Penyusunan Rencana Strategis Bisnis BLUD Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung



## KATA PENGANTAR

Segala puji kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas nikmat dan karunia-Nya, Laporan Akhir Penyusunan Rencana Strategis Bisnis BLUD Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung dapat diselesaikan. Penyusunan laporan ini berangkat dari keinginan yang besar untuk memberikan pelayanan transportasi yang terbaik kepada masyarakat Kota Bandung, khususnya dalam bidang pengelolaan perparkiran. Problematika perparkiran yang selama ini muncul dan terjadi di Kota Bandung merupakan masalah yang kompleks yang harus diselesaikan dengan adanya perencanaan yang matang dan menyeluruh. Dengan alasan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis BLUD Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut dan mengantisipasi permasalahan yang mendatang. Penyusunan laporan ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan parkir dan senantiasa meningkatkan pelayanan parkir di Kota Bandung.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan Rencana Strategis .....	4
1.3.1 Maksud Rencana Strategis .....	5
1.3.2 Tujuan Rencana Strategis.....	5
1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis.....	5
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN .....	8
2.1 Tugas dan Fungsi BLUD Parkir .....	8
2.1.1 Tugas BLUD Parkir.....	8
2.1.2 Struktur Organisasi BLUD Parkir.....	9
2.1.3 Pelayanan BLUD Parkir .....	9
2.2 Sumber Daya BLUD Parkir.....	13
2.2.1 Data SDM BLUD Parkir.....	14
2.2.2 Aset BLUD Parkir.....	15
2.3 Kinerja Pelayanan Pengelolaan Parkir di Kota Bandung.....	17
2.4 Tantangan dan Peluang BLUD Parkir .....	24
BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BLUD .....	26

3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BLUD Parkir	26
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandung .....	27
3.3	Telaahan RPJMD Kota Bandung.....	28
3.4	Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung .....	29
3.5	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung .....	33
3.6	Penentuan Isu - Isu Strategis.....	34
BAB 4	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BLUD PARKIR	35
4.1	Tujuan Jangka Menengah BLUD Parkir .....	35
4.2	Sasaran Jangka Menengah BLUD Parkir.....	35
BAB 5	STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN	37
BAB 6	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN KEUANGAN ...	39
BAB 7	KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN.....	42
BAB 8	PENUTUP .....	43

## DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Lokasi Parkir di Kota Bandung .....	11
Tabel 2-2 Lokasi TPE Aktif Tahun 2021 .....	11
Tabel 2-3 Lokasi TPE Non Aktif.....	12
Tabel 2-4 Nama Jabatan dan Jumlah Personil.....	14
Tabel 2-5 Inventarisasi Sarana dan Prasarana BLUD Parkir.....	15
Tabel 2-6 Jumlah Kendaraan Kota Bandung.....	18
Tabel 2-7 Capaian Kinerja Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung .....	24
Tabel 3-1 Penjabaran Misi 4 RPJMD Kota Bandung 2018 - 2023 .....	29
Tabel 3-2 Sandingan RPJMD Kota Bandung dengan Renstra Dinas Perhubungan.....	31
Tabel 4-1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BLUD Parkir Kota Bandung .....	36
Tabel 5-1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Panjang .....	38
Tabel 6-1 Rencana Program dan Pendanaan BLUD Parkir Kota Bandung 2022 - 2026 .....	40
Tabel 7-1 Indikator Kinerja BLUD Parkir Kota Bandung yang Mengacu pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bandung .....	42

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1 Struktur Organisasi BLUD UPT Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan.....	9
Gambar 2-2 Target dan Realisasi Retribusi Parkir Tahun 2013.....	19
Gambar 2-3 Target dan Total Realisasi Retribusi Parkir Tahun 2014 .....	20
Gambar 2-4 Target dan Total Realisasi Retribusi Parkir Tahun 2015 .....	20
Gambar 2-5 Target dan Total Realisasi Retribusi Parkir Tahun 2016 .....	21
Gambar 2-6 Target dan Total Realisasi Retribusi Parkir Tahun 2017 .....	21
Gambar 2-7 Target dan Total Realisasi Retribusi Parkir Tahun 2018 .....	22
Gambar 2-8 Target dan Total Realisasi Retribusi Parkir Tahun 2019 .....	22
Gambar 2-9 Target dan Total Realisasi Retribusi Parkir Tahun 2020 .....	23

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pelayanan transportasi perkotaan terhadap masyarakat setidaknya terdiri atas pelayanan akan pengelolaan angkutan publik, manajemen lalu lintas, dan pengelolaan parkir. Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan pengelolaannya karena keterkaitan yang tinggi antar masing - masing komponen tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam teori - teori transportasi bahwa semua unsur dalam sistem transportasi saling terikat satu sama lain untuk mencapai tujuan dari transportasi yang dasarnya adalah untuk menghantarkan barang dan/atau penumpang dari titik asal menuju titik tujuan dengan cepat, aman, dan selamat. Sistem - sistem tersebut seringkali dikenal dengan istilah sistem jaringan, sistem pergerakan, dan sistem kegiatan.

Pengelolaan parkir pun merupakan bagian dari sistem transportasi yang dapat dilihat baik pada sistem jaringan, sistem pergerakan, maupun sistem kegiatan walaupun lebih dominan termasuk kedalam antara sistem kegiatan dan sistem jaringan. Dalam Undang - undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Jalan, Parkir dijelaskan sebagai keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Dari definisi tersebut dapat dijelaskan dalam dua perspektif, yaitu dalam perspektif jaringan: kendaraan tersebut berhenti dalam suatu ruas jalan/koridor jalan tertentu; dan dalam perspektif kegiatan: pengemudi tersebut memiliki kepentingan di ruas jalan/koridor jalan tersebut sesuai dengan kegiatan yang dilakukannya (bekerja, belanja, dan sebagainya). Adapun jika melihat dari perspektif pergerakan, dapat dijelaskan bahwa kendaraan tersebut akan menjadi interupsi bagi arus pergerakan di ruas jalan tersebut.

Oleh karena itu, parkir harus dikelola sedemikian rupa dengan baik mengingat banyaknya hal - hal yang terlibat meskipun dari satu kendaraan saja yang melakukan parkir baik secara *on-street* maupun *off-street*. Tidak terkecuali dengan perparkiran di Kota Bandung. Urusan terkait dengan perparkiran di Kota Bandung merupakan tanggung jawab dari Dinas

Perhubungan Kota Bandung. Sebelumnya, pengelolaan parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung dilaksanakan oleh UPT Pengelolaan Parkir. Namun, dikarenakan fleksibilitas yang rendah dari organisasi UPT untuk mengelola perparkiran di Kota Bandung maka dilakukan reformasi dari UPT menjadi BLUD yang diharapkan dengan fleksibilitas dalam BLUD tersebut dapat meningkatkan pelayanan perparkiran di Kota Bandung itu sendiri.

Secara umum, permasalahan terkait pengelolaan parkir di Kota Bandung adalah maraknya praktik parkir liar di jalan - jalan Kota Bandung. Adanya praktik parkir liar tersebut dapat menyebabkan terganggunya arus lalu lintas di Kota Bandung karena keluar masuk kendaraan yang parkir dan juga sulit untuk dikendalikan tanggung jawab dari retribusi parkirnya karena tidak terdaftar oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung. Selain itu, Kota Bandung sendiri sudah memiliki teknologi untuk mengelola parkir yaitu dengan adanya mesin tiket parkir. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi tersebut pun belum optimal.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan dari Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 802 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kota Bandung, maka disusunlah Rencana Strategis Bisnis BLUD Parkir Tahun 2022 - 2026 ini sebagai *guideline* keberjalanan BLUD selama 5 tahun ke depan. Renstra Bisnis ini disusun untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan parkir. Renstra Bisnis BLUD Parkir ini berisikan mengenai visi, misi, dan program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, dan arah kebijakan operasional BLUD. Dengan adanya Rencana Strategis Bisnis ini, diharapkan sistem pengelolaan parkir di Kota Bandung dapat meningkat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Bandung secara efektif, efisien, fleksibel, dan transparan.

## 1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan penyusunan Renstra Bisnis ini adalah:

1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

- Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011 - 2031;
  10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 - 2023;
  11. Peraturan Walikota Bandung Nomor 802 Tahun 2018 tentang Pedoman Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kota Bandung.

### 1.3 Maksud dan Tujuan Rencana Strategis

Dengan adanya penyusunan Rencana Strategis Bisnis BLUD Parkir ini, maka diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terkait dengan pengelolaan parkir terhadap masyarakat Kota Bandung. Selain itu, dengan Renstra Bisnis ini juga diharapkan dapat menjawab tuntutan dan kebutuhan dari *stakeholder* lainnya baik dari lingkup lokal, regional, bahkan nasional. Oleh karena itu, penyusunan Renstra Bisnis ini memiliki maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan adanya laporan ini. Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis BLUD Parkir dapat dilihat sebagai berikut.

### 1.3.1 Maksud Rencana Strategis

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Bisnis BLUD Parkir ini adalah menyusun arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan serta rencana keuangan dari BLUD UPT Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung sebagai panduan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bandung 2019 - 2023.

### 1.3.2 Tujuan Rencana Strategis

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Bisnis ini adalah:

1. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi, dan peran BLUD UPT Pengelolaan Parkir yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan khususnya terkait dengan perparkiran di Kota Bandung dalam mencapai target Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bandung 2019 - 2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung 2018 - 2023.
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD UPT Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung.
3. Meningkatkan mutu pelayanan pengelolaan parkir di Kota Bandung.
4. Menjadi alat pengendali kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, pengawasan, analisis, dan evaluasi kegiatan.

### 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis

Dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis (BLUD UPT) Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bandung 2021-2026 dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Merupakan penjelasan dari latar belakang penyusunan Renstra, dasar hukum yang digunakan dalam proses penyusunan Renstra, maksud

dan tujuan, serta sistematika penulisan. Dalam bab ini, ada penjelasan sekilas mengenai kondisi permasalahan yang dihadapi dan bagaimana penyusunan renstra ini dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) BLUD UPT Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki BLUD UPT Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra BLUD UPT Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Perhubungan Kota Bandung yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra BLUD UPT Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung ini.

## BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada bagian ini dijelaskan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh BLUD UPT Pengelolaan Parkir secara lebih rinci yang didapatkan dari data - data baik primer maupun sekunder. Selain itu, dalam bagian ini pun terdapat pembahasan hasil telaahan terhadap visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih sebagai alat penajaman isu permasalahan yang dihadapi. Selain itu, terdapat juga pembahasan hasil penelaahan terhadap rencana - rencana lainnya seperti RPJMD Kota Bandung, Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung sebagai pedoman dalam penyusunan arah dan kebijakan dari BLUD UPT Pengelolaan Parkir ini.

#### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah BLUD UPT Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kota Bandung beserta indikator kinerjanya. Selain itu, dijelaskan juga terkait rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam lima tahun mendatang.

#### BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, KEUANGAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

#### BAB VI KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini, dijelaskan mengenai kinerja pelayanan dari BLUD UPT Pengelolaan Parkir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Penjabaran mengenai kinerja tersebut pun dijelaskan berdasarkan indikator dan parameter keberhasilan yang SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bound*) untuk memperjelas arah kerja tahunan yang akan disusun dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD UPT Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung.

#### BAB VII PENUTUP

Bagian penutup ini berisikan kesimpulan - kesimpulan yang didapatkan dari penyusunan Rencana Strategis Bisnis ini dan pernyataan komitmen pencapaian target yang sudah disusun dalam Renstra ini.

## BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN

### 2.1 Tugas dan Fungsi BLUD Parkir

Dalam subbab ini akan dijelaskan secara rinci mengenai lingkup tugas dan fungsi dari BLUD UPT Pengelolaan Parkir. Selain itu, dalam subbab ini pun akan dijelaskan mengenai struktur organisasi dari BLUD Parkir yang disesuaikan fungsinya berdasarkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 802 Tahun 2018. Lingkup pelayanan dan profil kewilayahan yang menjadi daerah pelayanan BLUD UPT Pengelolaan Parkir ini pun akan dibahas dalam subbab ini.

#### 2.1.1 Tugas BLUD Parkir

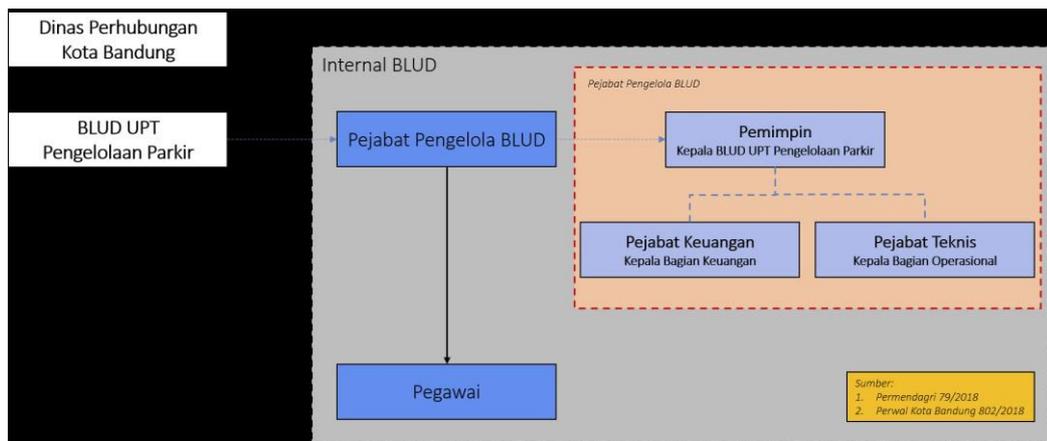
BLUD UPT Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Perhubungan lingkup perparkiran. Dalam menyelenggarakan tugas, BLUD UPT Pengelolaan Parkir pada Dinas Perhubungan memiliki fungsi: penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pengelolaan perparkiran, pelaksanaan operasional pengelolaan dan penataan perparkiran, pelaksanaan ketatausahaan BLUD UPT dan pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan perparkiran. Selain itu, dengan prinsip BLUD memiliki fleksibilitas dimana BLUD UPT Pengelolaan Parkir memiliki tambahan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan dimana diberikan hak untuk mendapatkan *profit* dari pengelolaan parkir walaupun dengan prinsip lembaga *not for profit* yang berarti BLUD UPT Pengelolaan Parkir diperkenankan untuk mencari sumber pendanaan lain selain dari APBD tetapi bukan dalam rangka mengejar keuntungan layaknya organisasi bisnis lain (*profit oriented*).

BLUD UPT Pengelolaan Parkir merupakan pelaksana teknis yang menjalankan pelayanan publik bagi masyarakat Kota Bandung melalui penyediaan fasilitas parkir pada badan jalan (*on-street parking*). Pelayanan parkir pada badan jalan di Kota Bandung terbagi atas 3 (tiga) area yaitu: pusat; penyangga dan pinggiran dengan perbedaan tarif dari setiap jenis kendaraan

dan area parkir. Pelayanan parkir pada badan jalan dilakukan BLUD UPT Pengelolaan Parkir dengan mengkoordinir juru parkir resmi dan penerapan sistem pembayaran parkir melalui mesin parkir otomatis di beberapa lokasi jalan di Kota Bandung.

### 2.1.2 Struktur Organisasi BLUD Parkir

Struktur organisasi yang dibentuk didalam BLUD Parkir dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi organisasi untuk dapat mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien. Penetapan struktur ini dimaksudkan untuk memberikan beban kerja yang proporsional terhadap pengelola dari BLUD UPT Pengelolaan Parkir. Terdapat dua bagian utama yang menjadi roda penggerak organisasi yaitu Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai. Pejabat Pengelola BLUD pun terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis. Gambaran mengenai struktur organisasi tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2-1 Struktur Organisasi BLUD UPT Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan

Pemimpin BLUD Parkir mempunyai tugas:

- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan;
- b. menyusun renstra bisnis;
- c. menyiapkan RBA;
- d. mengusulkan calon pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;

- e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.

Pejabat keuangan BLUD UPT mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan RBA;
- b. menyiapkan penyusunan RBA;
- c. menyiapkan DPA;
- d. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
- e. melakukan pengelolaan utang piutang;
- f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
- g. menyelenggarakan sistim informasi manajemen keuangan; dan
- h. menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan.

Pejabat teknis BLUD UPT mempunyai tugas dan kewajiban:

- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis;
- b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
- c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional teknis

### 2.1.3 Pelayanan BLUD Parkir

Hingga tahun 2021, BLUD UPT Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung memiliki tugas pelayanan pengelolaan parkir berupa penyediaan fasilitas parkir pada badan jalan (*on-street parking*). Pengelolaan parkir tersebut meliputi pengelolaan parkir manual dan pengelolaan parkir elektronik atau TPE (Tempat Parkir Elektronik). Dalam pengelolaan parkir ini, BLUD UPT Pengelolaan Parkir memiliki 3 (tiga) wilayah pelayanan yang terdiri atas zona pusat kota, zona penyangga kota, dan zona pinggiran kota. Berdasarkan jenis parkirnya, BLUD Pengelolaan Parkir mengelola baik parkir pada badan jalan (*on-street parking*) maupun parkir di luar badan jalan (*off-*

*street parking*). Adapun rincian dari wilayah pelayanan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 2-1 Lokasi Parkir di Kota Bandung

No	Zona	On-street Parking	Off-street Parking	Jumlah Lokasi Parkir
1	Zona Pusat Kota			66 lokasi
2	Zona Penyangga Kota			156 lokasi
3	Zona Pinggiran Kota			39 lokasi
Total Lokasi Parkir				

Adapun lokasi - lokasi TPE di Kota Bandung dibedakan antara yang aktif dan non aktif. TPE Aktif berarti TPE yang dapat digunakan dalam melakukan parkir sementara non aktif tidak dapat digunakan. Terdapat 247 unit TPE Aktif di Kota Bandung, dan 198 TPE Non Aktif. Penjabaran wilayah pembagian koordinasi TPE, jumlah, dan Kepala Koordinator yang bertanggung jawab dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2-2 Lokasi TPE Aktif Tahun 2021

No	Wilayah	Kator	Jumlah Unit TPE
1	Tegalega	Aan Romansyah	28 Unit
2		Asep Solehudin	6 Unit
3		Chandra Patria	17 Unit
4		Doni Rizki K	6 Unit
5		Rifaldy Fachri	3 Unit
6		Sahrulatip	19 Unit
7		Waldi Sansan N	8 Unit
8		Wawan Setiawan	18 Unit
Total Unit Aktif Tegalega			105 Unit
9	Bojonegara	Dadan	9 Unit
10		Ervan	13 Unit
11		Suryana Koswara	2 Unit
12		Suwanta	3 Unit

No	Wilayah	Kator	Jumlah Unit TPE
Total Unit Aktif Bojonegara			27 Unit
13	Cibeunying	Agus Kusdinar	24 Unit
14		Angga Burhanudin	6 Unit
15		Asep Haerudin	12 Unit
16		Deby Januar N	2 Unit
17		Gerdhi Surya H	16 Unit
18		Yana Taryana	5 Unit
19		Yossi Sagito	16 Unit
Total Unit Aktif Cibeunying			81 Unit
20	Karees	Dede Sugilar	14 Unit
21		M Sofyan Nurdin	4 Unit
22		Reno Sulkano	7 Unit
23		Riko Pramudia	9 Unit
Total Unit Aktif Karees			34 Unit
Total Unit Aktif			247 Unit

Sumber: BLUD Parkir, 2021

Wilayah Tegalega memiliki unit TPE terbanyak dengan jumlah 105 Unit. Sementara Wilayah Bojonegara memiliki unit TPE paling sedikit dengan jumlah 27 Unit. Kator yang bertanggung jawab atas jumlah unit TPE terbanyak adalah Aan Romansyah dengan jumlah 28 Unit dan Deby Januar N dan Suryana Koswara bertanggung jawab atas jumlah unit TPE paling sedikit sebanyak 2 unit untuk masing - masing Kator.

Tabel 2-3 Lokasi TPE Non Aktif

No	Wilayah	Kator	Jumlah Unit TPE
1	Bojonegara	Ayi Supriyadi	1 Unit
2		Dicky	1 Unit
3		Erick Fadilah S	8 Unit (3 Unit dicabut)
4		Ervan	9 Unit
5		Suryana Koswara	7 Unit
6		Suwanta	17 Unit (5 Unit dicabut)
Total Unit Non Aktif Bojonegara			43 Unit

No	Wilayah	Kator	Jumlah Unit TPE
7	Cibeunying	Agus Kusdinar	1 Unit
8		Angga Burhanudin	4 Unit
9		Asep Haerudin	2 Unit
10		Deby Januar N	9 Unit
11		Gerdhi Surya H	7 Unit
12		Luts Satria Sudiono	20 Unit
13		M Sobandi	15 Unit
14		Yana Taryana	15 Unit
Total Unit Non Aktif Cibeunying			73 Unit
15	Karees	Dede Sugilar	1 Unit
16		M Sofyan Nurdin	17 Unit
17		Reno Sulkanio	8 Unit
18		Riko Pramudia	30 Unit
19		Sukmana	7 Unit (5 Unit dicabut)
Total Unit Non Aktif Karees			63 Unit
20	Tegalega	Asep Solehhdin	5 Unit
21		Doni Rizki K	2 Unit (1 Unit dicabut)
22		Rifaldy Fachri	3 Unit
23		Sahrulatip	5 Unit (1 Unit dicabut)
24		Waldi Sansan N	1 Unit
25		Wawan Setiawan	3 Unit
Total Unit Non Aktif Tegalega			19 Unit
Total Unit Non Aktif			198 Unit

Sumber: BLUD Parkir, 2021

Unit - unit non aktif tersebut secara fisik masih terpasang di lokasinya masing - masing kecuali ada beberapa yang dicabut dan disimpan di Gudang BLUD Parkir. Adapun mesin - mesin tersebut menjadi non-aktif dikarenakan adanya kerusakan dalam mesin TPE.

## 2.2 Sumber Daya BLUD Parkir

Sumber daya merupakan hal yang penting dalam menjamin keberlangsungan BLUD Parkir. Sumber daya yang dimaksud bukan hanya dari

segi benda tetapi juga sumber daya manusia yang bekerja didalamnya. Pembahasan sumber daya BLUD Parkir terdiri atas Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, serta Sumber Daya Keuangan.

### 2.2.1 Data SDM BLUD Parkir

Sistem pelayanan tidak akan dapat berfungsi jika tidak ada yang menjalankan. Oleh karena itu, sumber daya manusia menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan dari BLUD Parkir. Sumber daya manusia yang menempati posisi jabatan di dalam organisasi BLUD Parkir merupakan orang - orang yang memiliki kompetensi untuk menempati jabatan tersebut. Secara keseluruhan, terdapat 81 personil yang menempati posisi di BLUD Parkir mulai dari pimpinan hingga pengawas perparkiran. Secara umum, jabatan dan personil yang menempatinnya dapat dilihat pada Tabel 2-4.

Tabel 2-4 Nama Jabatan dan Jumlah Personil

Jabatan	Jumlah
Bendahara Penerimaan	1
Bendahara Pengeluaran	1
Pengelola Keuangan/Aset	1
Pengurus Barang Pengguna	1
Koordinator Wilayah Parkir	4
Pengelola SDM	1
Pengelola Parkir Bulanan/Isidentil	3
Pengelola Program Dan Data	1
Staf Program Dan Data	2
Legal	2
Humas	1
Akuntan	2
Pengadministrasi Data	4
Pengadministrasi Aset Dan Barang Persediaan	2
Maintenance Terminal Parkir Elektronik	3
Pengadministrasi Umum	7

Jabatan	Jumlah
Kepala Sektor	35
Pengawas Dan Pengendalian Perparkiran	7

Selain jabatan yang berada di dalam administrasi lingkungan kantor BLUD Parkir, terdapat posisi sumber daya lain yang berada di lapangan yaitu juru parkir. Secara keseluruhan terdapat 1.715 juru parkir yang terdaftar di BLUD Parkir Kota Bandung.

### 2.2.2 Aset BLUD Parkir

Dalam menjalankan fungsi pelayanan, BLUD Parkir ditunjang dengan sarana dan prasarana. Sarana merupakan alat penunjang yang dapat berpindah/digerakkan sebagai alat mencapai tujuan sementara prasarana merupakan fasilitas dasar dimana sarana tersebut dapat berfungsi untuk mencapai tujuan. Inventarisasi sarana dan prasarana berikut ini meliputi sarpras yang berada di lingkungan kantor maupun di area pelayanan perparkiran. Rincian mengenai inventaris BLUD Parkir dapat dilihat pada

Tabel 2-5 Inventarisasi Sarana dan Prasarana BLUD Parkir

No	Nama Aset	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Mobil Dinas	1	unit	202.500.000,00	202.500.000,00
2	Mobil Operasional <i>APV Pick Up</i>	1	unit	114.500.000,00	114.500.000,00
3	Mobil Operasional <i>Hilux Pick Up</i>	1	unit	212.600.000,00	212.600.000,00
4	Motor Dinas <i>N-Max</i>	3	unit	21.000.000,00	63.000.000,00
5	Motor Dinas <i>CRF</i>	5	unit	34.175.000,00	170.875.000,00
6	Terminal Parkir Elektronik	445	unit	123.500.000,00	54.957.500.000,00
7	Marka Parkir	2385	m <sup>2</sup>	270.000,00	643.950.000,00
8	Papan Petunjuk Parkir	500	buah	2.250.000,00	1.125.000.000,00
9	<i>Boom Gate</i>	2	unit	10.500.000,00	21.000.000,00
10	TV	3	unit	4.000.000,00	12.000.000,00
11	AC	8	buah	4.875.000,00	39.000.000,00
12	Kulkas	4	buah	2.500.000,00	10.000.000,00

No	Nama Aset	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
13	Dispenser	1	unit	3.500.000,00	3.500.000,00
14	<i>Water Heater</i>	2	unit	3.528.303,00	7.056.606,00
15	<i>Sound System</i>	1	set	4.500.000,00	4.500.000,00
16	Komputer PC	10	unit	6.000.000,00	60.000.000,00
17	<i>All in One PC</i>	4	unit	9.500.000,00	38.000.000,00
18	Laptop <i>core i5</i>	2	unit	17.400.000,00	34.800.000,00
19	Laptop <i>core i7</i>	6	unit	20.900.000,00	125.400.000,00
20	Monitor CC Room 47"	4	unit	9.000.000,00	36.000.000,00
21	Proyektor	1	buah	5.600.000,00	5.600.000,00
22	Printer	8	buah	3.200.000,00	25.600.000,00
23	Mesin Penghancur Kertas	1	buah	3.700.000,00	3.700.000,00
24	Mesin Penghitung Uang	3	buah	1.200.000,00	3.600.000,00
25	Mesin tik elektronik	1	buah	1.500.000,00	1.500.000,00
26	Mesin tik manual	2	buah	1.000.000,00	2.000.000,00
27	APAR	6	unit	2.800.000,00	16.800.000,00
28	Kursi Kerja	49	buah	900.000,00	44.100.000,00
29	Meja CS	1	set	15.000.000,00	15.000.000,00
30	Unit Meja <i>Credenza</i> 2,1 M	2	unit	5.764.000,00	11.528.000,00
31	<i>Vertical Blind</i>	97,15	M <sup>2</sup>	303.000,00	29.436.450,00
32	Meja Rapat 1,2 x 4,2 M	1	buah	21.016.800,00	21.016.800,00
33	Kursi Rapat	13	buah	1.150.000,00	14.950.000,00
34	Kursi Pimpinan Rapat	1	buah	1.250.000,00	1.250.000,00
35	Meja Counter	1	buah	5.000.000,00	5.000.000,00
36	Sofa	1	unit	15.000.000,00	15.000.000,00
37	Kursi Hadap	2	buah	1.150.000,00	2.300.000,00
38	Karpet Ruangan	51,4	M <sup>2</sup>	350.000,00	17.990.000,00
39	Meja Kerja	1	unit	7.420.000,00	7.420.000,00
40	<i>Credenza</i> 2 M	1	unit	5.240.000,00	5.240.000,00
41	Sofa dan Meja Tamu	1	unit	9.000.000,00	9.000.000,00
42	Kursi Kerja	2	buah	2.730.000,00	5.460.000,00
43	Meja Work Station 4 meja	6	unit	9.300.000,00	55.800.000,00

No	Nama Aset	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
44	Meja Work Station 2	2	unit	4.650.000,00	9.300.000,00
45	meja Meja Kantor	45	buah	600.000,00	27.000.000,00
46	Meja Rapat	1	set	4.500.000,00	4.500.000,00
47	Filing	15	buah	850.000,00	12.750.000,00
48	Kabinet	3	buah	900.000,00	2.700.000,00
49	Lemari Besi	2	buah	1.500.000,00	3.000.000,00
50	Lemari Kaca	8	buah	4.500.000,00	36.000.000,00
51	Lemari Kayu	29	buah	450.000,00	13.050.000,00
52	bupet Kursi kerja	3	buah	1.250.000,00	3.750.000,00
53	Kursi kerja	8	buah	750.000,00	6.000.000,00
54	besar kursi	2	set	2.500.000,00	5.000.000,00
55	tunggu	1	set	3.500.000,00	3.500.000,00
56	Kursi tamu	2	buah	800.000,00	1.600.000,00
57	Meja Sudut	2	unit	3.500.000,00	7.000.000,00
58	White	24	buah	285.000,00	6.840.000,00
59	board	4	buah	125.000,00	500.000,00
60	Lemari brankas	1	unit	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	Kursi <i>Chitose</i>	Total			63.342.962.856
	Jam dinding				
	Tanah dan bangunan kantor				

### 2.3 Kinerja Pelayanan Pengelolaan Parkir di Kota Bandung

Untuk menyelenggarakan pemerintahan, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Disahkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku mulai 1 Januari 2010, Undang-Undang ini mengatur mengenai pemungutan pajak dan retribusi oleh Pemerintah Daerah di wilayahnya. Dengan adanya kewenangan yang dimiliki, maka pemerintah daerah berusaha menggali sumber-sumber perekonomian daerah yang dapat dijadikan sebagai pendapatan daerah. Salah satunya adalah pendapatan dari Retribusi Parkir.



Kota Bandung memiliki potensi yang besar sebagai salah satu kota destinasi tujuan wisata yang menarik pendatang dari berbagai daerah di Indonesia bahkan dari mancanegara. Kota yang dijuluki sebagai kota kembang ini memiliki banyak pesona, mulai dari kuliner, tempat wisata, pusat belanja fashion dan tumbuhnya industri kreatif. Sehubungan dengan hal itu, maka semakin bertambahnya jumlah kendaraan pribadi roda dua maupun roda empat yang semakin memenuhi jalanan kota Bandung. Berikut data mengenai jumlah kendaraan yang ada di Kota Bandung menurut kepemilikannya beserta jenisnya.

Tabel 2-6 Jumlah Kendaraan Kota Bandung

Jenis Kendaraan	Pribadi	Dinas	Umum
Mobil Penumpang	318,598	3,727	7,757
Bus, Minibus	2,181	221	3,166
Truk	61,604	1,356	3,181
Sepeda Motor	1,030,729	10,692	
Jumlah Total	1,413,112	15,996	14,104

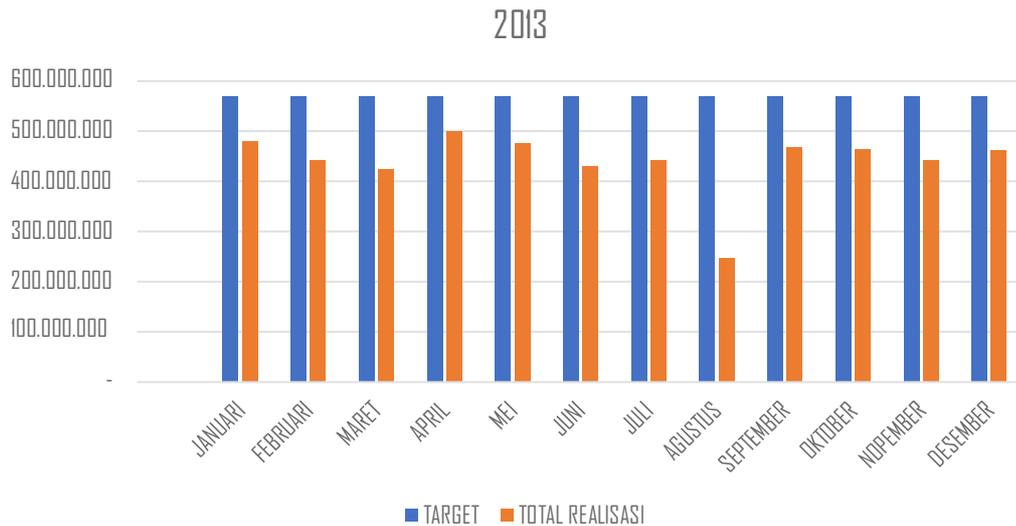
Sumber: Kota Bandung dalam Angka

Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa jumlah kepemilikan kendaraan yang cukup banyak dapat mencerminkan kebutuhan akan tempat parkir yang memadai dan tersebar di berbagai sudut Kota Bandung. Namun, seringkali tempat parkir yang ada masih belum memadai, sehingga banyak kendaraan yang tidak tertampung dan harus parkir dibahu jalan. Kendaraan yang parkir dibahu jalan akan dikenai retribusi parkir yang masuk menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kota Bandung.

Pengelolaan perparkiran di bahu jalan Kota Bandung menjadi kewenangan Unit Pelaksana Teknis Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung. Tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Pengelola Perparkiran yaitu melaksanakan pengelolaan perparkiran sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas di Lingkungan Kota Bandung.

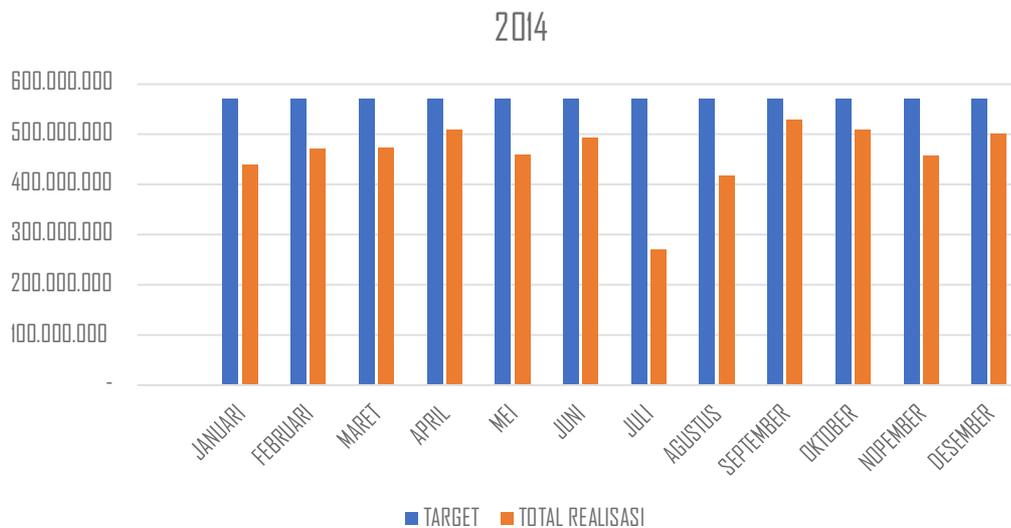
Proses pengelolaan retribusi parkir yang dikelola oleh UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung merupakan salah satu sumber pendapatan

terbesar yang diperoleh Dinas Perhubungan Kota Bandung, pendapatan tersebut dikelola sesuai dengan prosedur yang ada agar rencana yang ditetapkan dapat berjalan dengan baik, rencana tersebut berupa target yang harus di realisasikan sehingga pendapatan yang diterima dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan.



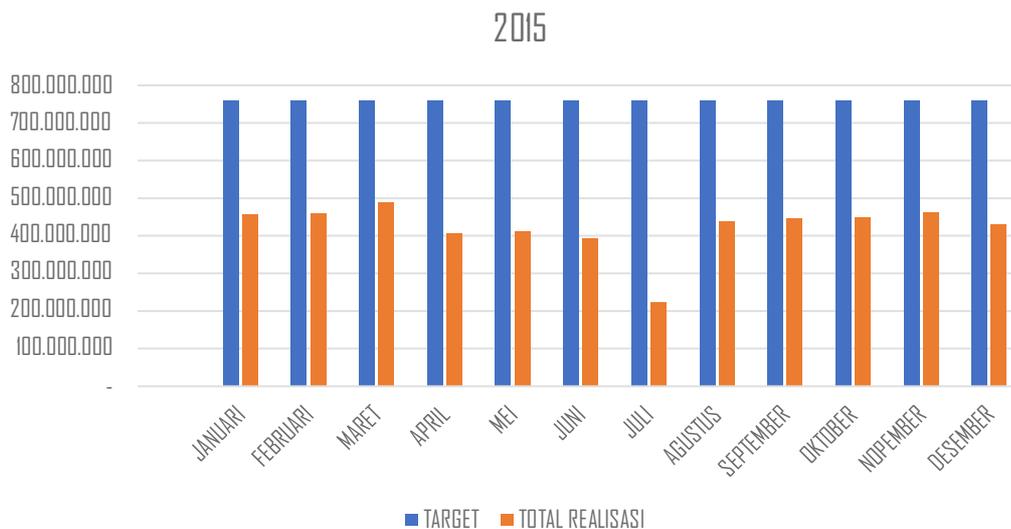
Gambar 2-2 Target dan Realisasi Retribusi Parkir Tahun 2013

Berdasarkan data historis, pada tahun 2013, UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung mampu mendapatkan total realisasi pendapatan retribusi sebesar 5,276 miliar dalam tahun 2013, yaitu 76,97% dari target yang telah ditetapkan.



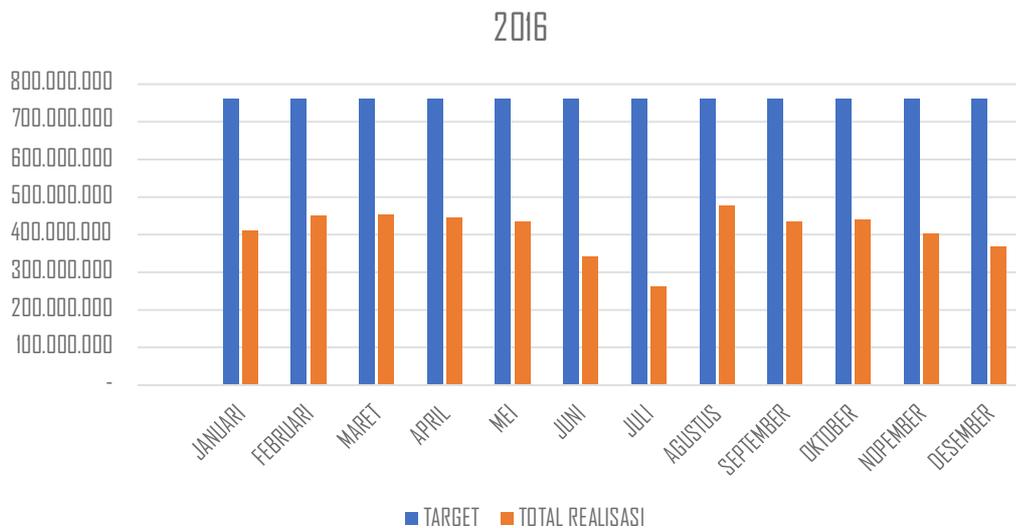
Gambar 2-3 Target dan Total Realisasi Retribusi Parkir Tahun 2014

Pada tahun 2014, UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung masih mendapatkan target yang sama pada tahun sebelumnya, dimana pencapaian total realisasi retribusi pada tahun 2014 mencapai 80,65%, meningkat 3,68% dari tahun sebelumnya.



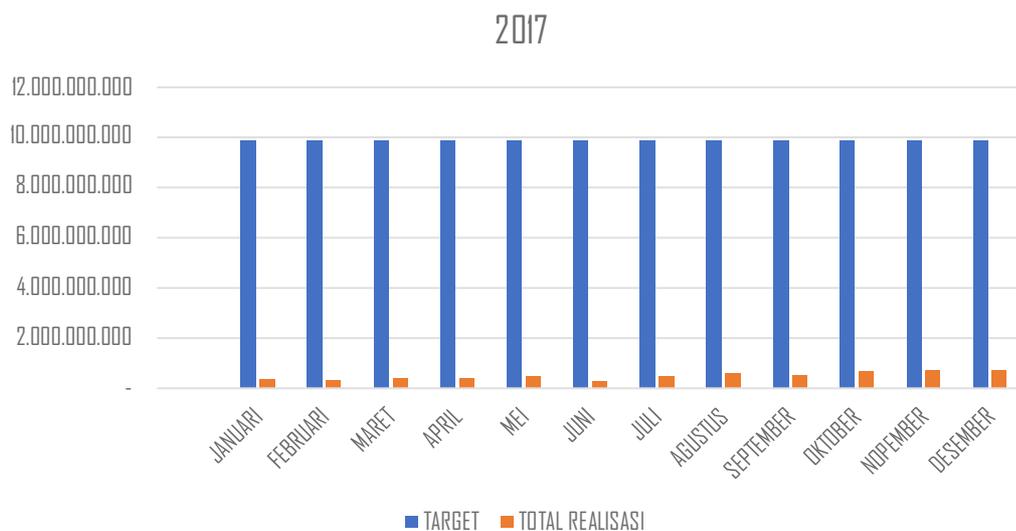
Gambar 2-4 Target dan Total Realisasi Retribusi Parkir Tahun 2015

UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung mendapatkan peningkatan target retribusi pada tahun 2015 sebesar 33,04% menjadi 9,12 miliar. Pada Tahun tersebut, total realisasi yang dapat dilakukan sebesar 5,071 miliar atau sebesar 55,60%.



Gambar 2-5 Target dan Total Realisasi Retribusi Parkir Tahun 2016

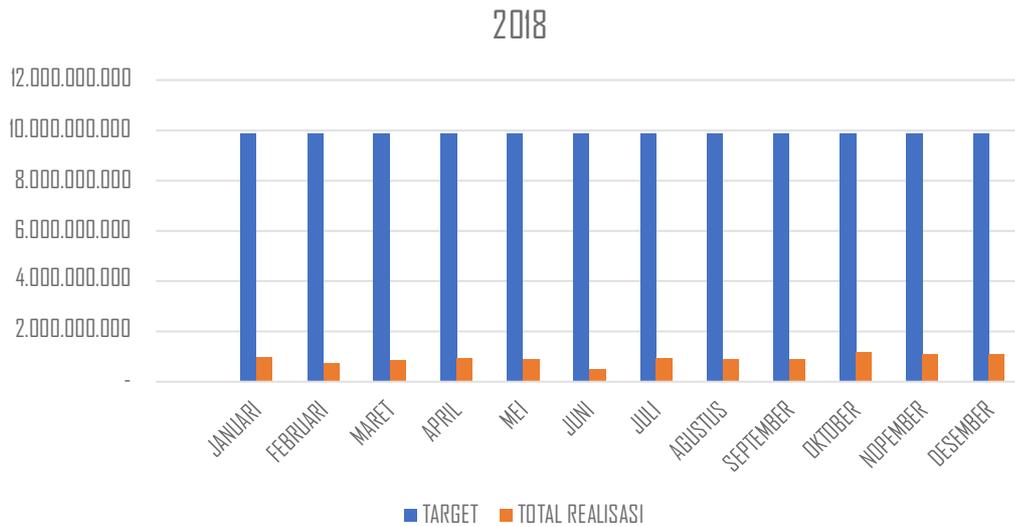
Pada Tahun 2016, besaran target retribusi parkir tetap sama dengan Tahun 2015. UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung mampu merealisasikan pungutan retribusi pada Tahun 2016 sebesar 4,917 miliar atau sebesar 53,91%.



Gambar 2-6 Target dan Total Realisasi Retribusi Parkir Tahun 2017

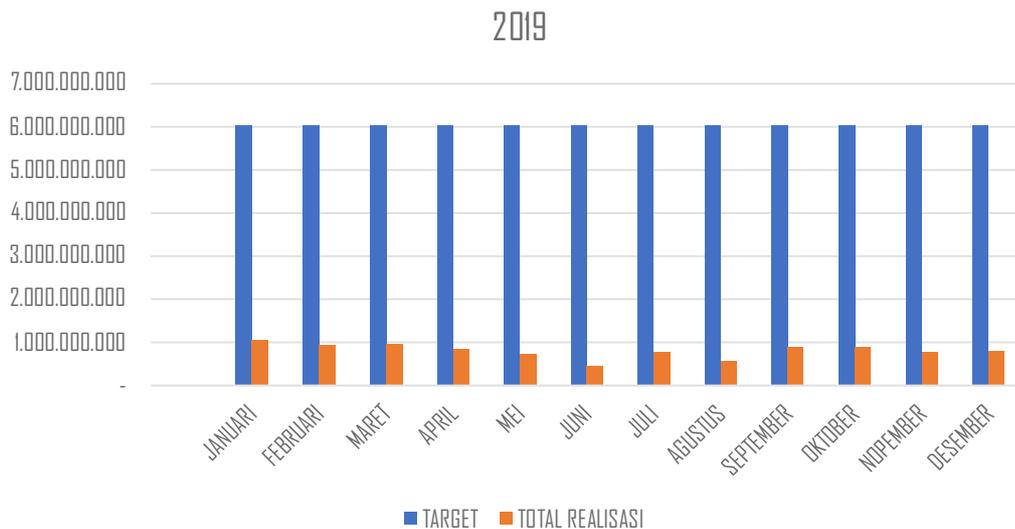
Pada Tahun 2017, seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan melalui Terminal Parkir Elektronik (TPE) di lokasi-lokasi pusat Kota Bandung, terjadi peningkatan terhadap target retribusi parkir di Kota Bandung. Peningkatan target retribusi mencapai 1201% dari target retribusi tahun

sebelumnya, sehingga memang realisasi yang bisa dicapai menjadi sangat rendah yaitu hanya 5,14% atau sejumlah 6,099 miliar.



Gambar 2-7 Target dan Total Realisasi Retribusi Parkir Tahun 2018

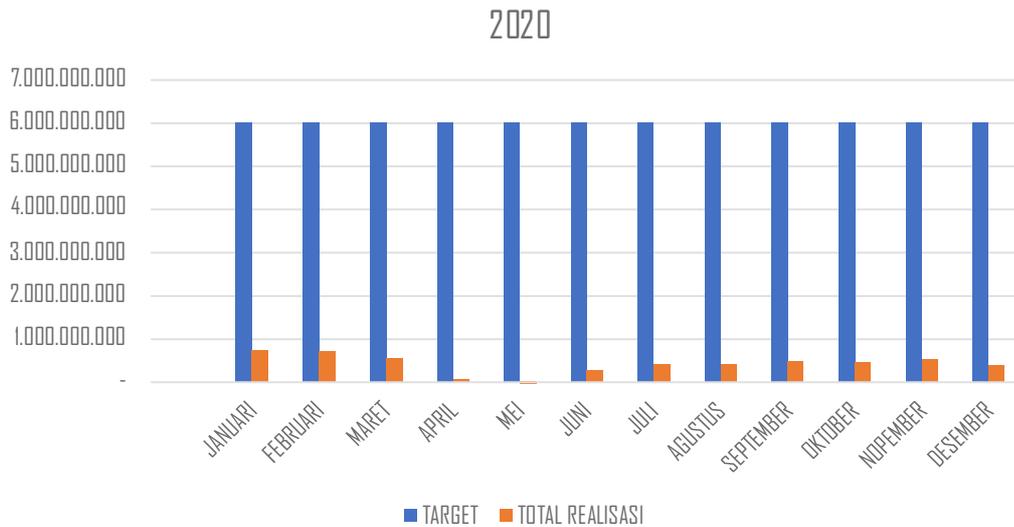
DI tahun 2018 target retribusi parkir masih sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pencapaian realisasi retribusi pun masih terbilang kecil dibandingkan target, sejumlah 10,875 miliar atau hanya 9,166% dari target.



Gambar 2-8 Target dan Total Realisasi Retribusi Parkir Tahun 2019

Memasuki tahun 2019, target retribusi parkir Kota Bandung diturunkan sebesar 38,9% dari target tahun sebelumnya, akan tetapi realisasi baru bisa

mencapai 20,87% karena memang target retribusi yang masih termasuk besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.



Gambar 2-9 Target dan Total Realisasi Retribusi Parkir Tahun 2020

Pada Tahun 2020, sejak bulan Maret dimana memasuki masa pandemi Covid-19, terjadi penurunan drastis pemasukan retribusi parkir sehingga secara keseluruhan hampir setengah pendapatan tahun sebelumnya hilang dan hanya tercapai 7,2% dari target tahun 2020. Hal ini disebabkan penurunan mobilitas masyarakat yang memang dibatasi dengan adanya pembatasan sosial berskala besar untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Selain dari pendapatan parkir, kinerja pelayanan BLUD Parkir pun mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bandung. Terkait dengan indikator kinerja UPT Parkir, Dinas Perhubungan Kota Bandung menetapkan dua indikator kinerja yaitu indikator mesin parkir yang beroperasi dan IKM. Realisasi target kinerja BLUD Parkir terkait dengan target Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung dapat dilihat pada Tabel 2-7.

Tabel 2-7 Capaian Kinerja Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Realisasi*	Persentase Capaian 2023
		2019	2020	2021	2022	2023		
1	Mesin parkir yang beroperasi	445	445	445	445	445	247	55,5%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	70	72	82	83,5	85	80,34	94,5%

Keterangan: \*= Triwulan III Tahun 2021

Dalam indikator kinerja mesin parkir yang beroperasi, dari 445 unit TPE yang tersedia hanya 247 unit yang beroperasi. Sisa unit yang tidak beroperasi (berjumlah 198 unit) mengalami kerusakan pada unit mesin sehingga memerlukan adanya perbaikan agar dapat beroperasi kembali. Dengan demikian, dalam pemenuhan indikator mesin parkir yang beroperasi tidak memerlukan adanya pembelian unit baru melainkan masih dapat menggunakan perbaikan unit - unit yang lama.

Dalam indikator indeks kepuasan masyarakat, secara target kinerja pada Triwulan III Tahun 2021 sudah mencapai 94,5 % dari target Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bandung. Dengan demikian, maka nilai IKM sudah pada kategori nilai Baik. Walaupun demikian, masih tetap ditemukan kendala - kendala di lapangan terkait dengan aspek kepuasan masyarakat mulai dari ketidakdisiplinan juru parkir dan juga ketidakdisiplinan dari pengguna jalan itu sendiri terkait dengan durasi parkir yang mempengaruhi besaran tarif parkir yang dapat ditarik.

#### 2.4 Tantangan dan Peluang BLUD Parkir

Tantangan yang dihadapi oleh BLUD Parkir diantaranya adalah kondisi pandemi COVID-19 yang belum selesai baik secara lokal maupun global. Kondisi pandemi tersebut terbukti mengurangi pelayanan perparkiran di Kota Bandung yang dapat dilihat dari penurunan retribusi yang diterima. Dengan adanya kondisi ini, maka perparkiran harus dapat berinovasi untuk meningkatkan pendapatan dengan sambil menjaga kualitas pelayanan parkir

di Kota Bandung. Selain itu, tantangan selanjutnya adalah tingkat kemajuan teknologi yang belum sepenuhnya dapat diterapkan dilihat dari beberapa aspek mulai dari kesiapan infrastruktur, pendanaan, dan juga sumber daya manusianya. Jika pemanfaatan teknologi sudah semakin dapat dikuasai dalam perparkiran maka secara otomatis pelayanan perparkiran pun akan menjadi lebih baik.

Namun, terdapat beberapa peluang yang dapat membantu meningkatkan pelayanan perparkiran di Kota Bandung. Salah satu peluang tersebut adalah masifnya perkembangan transportasi di dunia maupun di Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk menjawab tantangan keterbatasan teknologi tersebut. Selain itu, Dishub Kota Bandung dan Pemerintah Kota Bandung secara umum memiliki aset - aset lahan yang dapat digunakan sebagai tempat parkir *off-street*. Pengembangan *off-street parking* akan menjadi pembaruan dari BLUD Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung karena selama ini fokus utamanya baru merambah *on-street parking* saja. Dengan pengelolaan *off-street parking* ini, BLUD Parkir dapat berkolaborasi dengan BLUD Angkutan maupun dengan instansi lain untuk menjawab kebutuhan lahan parkir di Kota Bandung dan juga peningkatan penggunaan transportasi publik di Kota Bandung.

## BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BLUD

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BLUD Parkir

Perkembangan transportasi harus selalu ditingkatkan seiring dengan berkembangnya suatu kota. Transportasi diibaratkan sebagai pembuluh darah bagi perkotaan yang mana harus selalu dijaga agar tidak terjadi penyumbatan atau hambatan yang dapat menyebabkan kemacetan maupun hal - hal lain yang merugikan bagi masyarakat kota. Hal tersebut pun tidak berbeda dengan pengelolaan parkir yang harus diupayakan agar dapat memberikan pelayanan yang optimal tetapi di sisi lain tidak menambah beban lalu lintas perkotaan, khususnya di Kota Bandung.

Kota Bandung merupakan ibukota Provinsi Jawa Barat yang termasuk kedalam salah satu kota terbesar di Indonesia dan juga merupakan kota inti dari salah satu metropolitan terbesar yaitu Metropolitan Bandung Raya (*Bandung Metropolitan Area*). Sebagai salah satu kota besar, tentu saja Kota Bandung tidak terlepas dari permasalahan transportasi yang kompleks. Permasalahan - permasalahan di Kota Bandung terkait transportasi, khususnya perparkiran diantaranya adalah:

1. Jumlah penduduk Kota Bandung yang cukup tinggi yaitu sekitar + 2,4 Juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk pertahun sebesar 3% menyebabkan kebutuhan akan transportasi yang cukup tinggi, adapun faktor yang 18 mempengaruhi adalah daya tarik kota Bandung yang mendorong orang untuk berkunjung ataupun menetap di Kota Bandung.
2. Kemacetan lalu lintas di Kota Bandung sehingga mengakibatkan kemacetan pada pusat kota terutama menjelang hari libur (Jum'at, Sabtu, Minggu), adapun pada hari kerja faktor yang mendorong karena kecenderungan pergerakan kendaraan dari daerah pinggiran dan perbatasan Kota menuju ke daerah perkantoran, sentra usaha/bisnis, sekolah dan sebagainya. Adapun pada hari libur faktor yang

mendorong banyaknya pendatang dari luar kota khususnya Jakarta yang mengisi akhir pekannya di sentra-sentra wisata belanja.

3. Masih maraknya praktik parkir liar di beberapa ruas jalan yang bukan peruntukannya, adapun faktor yang mempengaruhi adalah keterbatasan lahan parkir yang disediakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (sekolah, kantor, tempat usaha dan sebagainya).
4. Belum tegaknya disiplin baik dari pengguna parkir maupun operator pengelola parkir (juru parkir) terutama mengenai penggunaan TPE dimana pengguna parkir belum sepenuhnya jujur mengenai waktu penggunaan lahan parkir dan juga kedisiplinan juru parkir dalam menarik tarif parkir kepada pengguna lahan parkir menggunakan TPE.
5. Belum tersedianya tempat - tempat yang menyediakan layanan *off-street parking* untuk pengguna jalan raya secara umum sehingga sering terjadi kemacetan yang diakibatkan oleh akses masuk dan keluar lahan parkir pinggir jalan (*on-street parking*).

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandung

Visi Kepala Daerah Kota Bandung yaitu “Terwujudnya Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis” yang dijabarkan dalam misi - misinya, yaitu:

1. Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas, dan daya saing.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan melayani.
3. Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan.
4. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

Sebagai badan yang memberikan pelayanan publik secara efektif dan efisien terhadap masyarakat Kota Bandung, maka BLUD UPT Pengelolaan Parkir menjalankan implementasi dari visi terwujudnya kenyamanan di Kota Bandung melalui mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan melayani sebagai badan pelayanan publik dan juga misi mewujudkan Bandung nyaman, khususnya dalam pembangunan infrastruktur perparkiran. Dengan demikian, dengan pelayanan pengelolaan parkir yang efektif dan efisien, maka peningkatan kualitas dari infrastruktur perparkiran pun akan mendukung kemajuan perkembangan dari Kota Bandung itu sendiri.

### 3.3 Telaahan RPJMD Kota Bandung

RPJMD Kota Bandung merupakan terjemahan dari apa yang dicanangkan oleh Kepala Daerah Kota Bandung melalui visi dan misinya. Terkait kepada “Misi 4: Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan”, maka disusunlah tujuan dalam RPJMD Kota Bandung untuk terwujudnya infrastruktur tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan dengan sasaran meningkatnya infrastruktur kota terpadu dan berkualitas. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa salah satu penyebab kemacetan ialah parkir pada badan jalan yang tidak terkendali. Salah satu sasaran dari Misi 4 itu adalah meningkatnya infrastruktur kota terpadu dan berkualitas dengan salah satu indikator yang digunakannya adalah persentase penurunan kemacetan. Dikaitkan dengan permasalahan yang ada, maka BLUD UPT Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung bertekad untuk membenahi pengelolaan parkir agar memperbaiki kondisi parkir, khususnya di badan jalan, agar tidak meningkatkan faktor hambatan samping bagi lalu lintas di Kota Bandung. Adapun yang gambaran terkait penjabaran Misi 4 dalam RPJMD Kota Bandung dapat dilihat pada Tabel III.1. Adapun sasaran dan indikator sasaran yang dicetak tebal merupakan sasaran yang terkait dengan tupoksi Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Tabel 3-1 Penjabaran Misi 4 RPJMD Kota Bandung 2018 - 2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1. Terwujudnya Infrastruktur dan Tata Ruang Kota yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	4.1 <i>Indeks Liveable City</i> (Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur)	4.1.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	4.1.1.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
			4.1.1.2 Persentase Luasan RTH
			4.1.1.3 Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah
		4.1.2 Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	4.1.2.1 Persentase Penurunan Kemacetan
			4.1.2.2 Persentase Luasan Kawasan Kumuh
			4.1.2.3 Cakupan Pelayanan Air Minum
			4.1.2.4 Persentase Penurunan Titik Genangan

Sumber: RPJMD Kota Bandung 2018 - 2023

### 3.4 Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung

Sebagai perangkat daerah Kota Bandung yang bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan di bidang perhubungan, maka Dinas Perhubungan Kota Bandung pun menyusun Rencana Strategis Dinas yang mengacu kepada RPJMD Kota Bandung. Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan Renstra Bisnis BLUD UPT Pengelolaan Parkir dimana menjadi penting untuk mempelajari lebih dalam terkait amanat Renstra Dinas Perhubungan terkait dengan pengelolaan parkir.

Dinas Perhubungan Kota Bandung sendiri memiliki tujuan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2019 -2023 yaitu terciptanya peningkatan kinerja pelayanan transportasi yang handal. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka disusunlah

sasaran - sasaran sebagai *milestone* pencapaian tujuan tersebut. Sasaran - sasaran yang ingin dicapainya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya mobilitas penduduk kota;
2. Meningkatnya aksesibilitas sarana prasarana jalan;
3. Meningkatnya manajemen kebutuhan lalu lintas;
4. Meningkatnya keselamatan berlalu lintas.
5. Meningkatnya Kapasitas Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Tabel 3-2 Sandingan RPJMD Kota Bandung dengan Renstra Dinas Perhubungan

Misi 4: Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan					
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator
Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya Infrastruktur kota terpadu dan berkualitas	Penurunan persentase kemacetan	Meningkatnya infrastruktur kota terpadu dan berkualitas		Jumlah aspek penyebab kemacetan
				Meningkatnya ketertiban berlalu lintas	Simpang tertib lalu lintas
				Meningkatnya manajemen lalu lintas	Rasio pengguna kendaraan umum dan pengguna kendaraan pribadi
				Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	Presentase sarana dan prasarana transportasi
				Meningkatnya mobilitas penduduk kota dan keselamatan angkutan	Cakupan mobilitas penduduk kota dan keselamatan angkutan

Misi 4: Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan					
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator
				Kapasitas kinerja Dinas Perhubungan Kota (IKM) Bandung	Indeks Kepuasan Masyarakat

Sumber: Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung 2019 - 2023

### 3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung

Penataan ruang Kota Bandung memiliki tujuan untuk mewujudkan tata ruang kota yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka dirumuskan sasaran - sasaran penataan ruang diantaranya.

1. terwujudnya fungsi dan peran Kota Bandung yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Cekungan Bandung, Provinsi dan Nasional;
2. tersedianya sistem transportasi serta pelayanan prasarana dan sarana Kota Bandung yang merata dan berkualitas;
3. terwujudnya keserasian kawasan lindung dan budidaya yang seimbang dan berkelanjutan;
4. terwujudnya kelestarian kawasan dan bangunan yang menjadi identitas Kota Bandung;
5. tersedianya ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, nyaman dan efektif;
6. terwujudnya pemanfaatan ruang yang tertib dan terkendali; dan
7. terwujudnya ruang evakuasi bencana (mitigasi) yang aman.

Sasaran kedua merupakan sasaran penataan ruang yang terkait dengan pengelolaan parkir. Strategi terkait parkir yang tertuang dalam RTRW Kota Bandung Tahun 2011 - 2031 ini adalah menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terpadu dengan pusat - pusat kegiatan untuk menunjang kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik. Secara lebih rinci, pengelolaan parkir dijabarkan dalam Rencana Struktur Ruang Kota Bandung 2011 - 2031. Dalam Rencana Struktur Ruang tersebut, pengembangan parkir termasuk kedalam rencana sistem jaringan transportasi darat khususnya terkait rencana penerapan strategi manajemen kebutuhan transportasi /TDM (*Transportation Demand Management*) yaitu mengembangkan strategi manajemen parkir yang bersifat

disinsentif maupun insentif. Strategi disinsentif yang direncanakan adalah adanya penerapan tarif parkir progresif di pusat kota, khususnya pada jalan - jalan yang digunakan untuk *on-street parking*. Adapun strategi intensif yang direncanakan adalah dengan menyediakan bangunan parkir di pusat - pusat perbelanjaan dan perkantoran.

### 3.6 Penentuan Isu - Isu Strategis

Isu - isu strategis yang akan dihadapi oleh BLUD Parkir selama 5 tahun mendatang, berdasarkan pada identifikasi masalah dan telaahan - telaahan yaitu:

1. Peningkatan kedisiplinan penggunaan dan pembayaran tarif parkir baik parkir manual maupun TPE.
2. Peningkatan kapasitas juru parkir dalam mengoperasikan dan menarik pembayaran tarif parkir TPE.
3. Peningkatan pengawasan terhadap lokasi - lokasi TPE.
4. Perumusan rencana pembangunan fasilitas *off-street parking* yang terintegrasi.
5. Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan parkir.

## BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BLUD PARKIR

### 4.1 Tujuan Jangka Menengah BLUD Parkir

Melihat dari isu - isu dan telaahan terhadap rencana - rencana terkait dengan pengelolaan parkir, maka BLUD Parkir perlu menyusun tujuan jangka menengah dalam rangka meningkatkan pelayanan parkir di Kota Bandung. Tujuan dirumuskan sebagai arahan umum dalam mencapai kinerja pelayanan perparkiran yang disusun dalam jangka 5 (lima) tahun. Tujuan ini pun dirumuskan dalam rangka mendukung program - program di atasnya baik program Dinas Perhubungan maupun program yang terkait dalam RPJMD Kota Bandung. Dengan demikian, tujuan jangka menengah BLUD Parkir Kota Bandung adalah:

*“Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan perparkiran yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan di Kota Bandung”*

### 4.2 Sasaran Jangka Menengah BLUD Parkir

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang sudah dirumuskan dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Sasaran merupakan hasil atau luaran dari BLUD Parkir yang ditetapkan dalam waktu tertentu dengan indikator - indikatornya. Adapun sasaran dari BLUD Parkir Kota Bandung adalah:

1. Meningkatnya kualitas perangkat perparkiran di Kota Bandung.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perparkiran di Kota Bandung dari segi sumber daya manusia dan inovasi penyelenggaraan perparkiran.

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran dapat dilihat pada Tabel 4-1

Tabel 4-1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BLUD Parkir Kota Bandung

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Mewujudkan penyelenggaraan perparkiran yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan di Kota Bandung	Jumlah mesin parkir yang beroperasi	Meningkatnya kualitas perangkat perparkiran di Kota Bandung	Jumlah mesin parkir yang beroperasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan perparkiran di Kota Bandung dari segi sumber daya manusia dan inovasi penyelenggaraan perparkiran	Jumlah SDM parkir yang ideal
			Persentase dokumen perencanaan

## BAB 5 STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

Dalam rangka mencapai tujuan yang dirumuskan pada Rencana Strategis ini, maka diperlukan strategi - strategi dengan arah kebijakan yang mampu mengakomodir pencapaian tujuan tersebut. Strategi dan arah kebijakan tersebut pun merupakan acuan dalam penyusunan program. Strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan dalam rangka pencapaian tujuan jangka panjang BLUD Parkir Kota Bandung adalah sebagai berikut:

1. Strategi meningkatkan perangkat perparkiran yang beroperasi di seluruh wilayah pelayanan pelayanan parkir di Kota Bandung dengan arahan kebijakan yaitu peningkatan jumlah TPE Non Aktif yang diperbaiki.
2. Strategi meningkatkan kualitas SDM juru parkir dengan arahan kebijakan yaitu:
  - a. Peningkatan jumlah SDM juru parkir yang terdidik.
  - b. Peningkatan pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan parkir di lokasi - lokasi parkir.
3. Strategi merumuskan inovasi - inovasi penyelenggaraan parkir di Kota Bandung dengan arahan kebijakan yaitu:
  - a. Peningkatan kajian mengenai penyelenggaraan parkir di luar badan jalan (*off-street parking*).
  - b. Peningkatan kajian mengenai pemanfaatan teknologi dalam pelayanan parkir.
  - c. Peningkatan kajian kerjasama BLUD Parkir dengan pihak - pihak lain .

Tabel 5-1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Panjang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan penyelenggaraan perparkiran yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan di Kota Bandung	Meningkatnya kualitas perangkat perparkiran di Kota Bandung	meningkatkan perangkat perparkiran yang beroperasi di seluruh wilayah pelayanan parkir	Peningkatan TPE Non Aktif yang diperbaiki
	Meningkatnya kualitas pelayanan perparkiran di Kota Bandung dari segi sumber daya manusia dan inovasi penyelenggaraan perparkiran	Meningkatkan kualitas pelayanan perparkiran melalui peningkatan kapasitas dan kualitas SDM Parkir dan juga melalui pengembangan inovasi penyelenggaraan perparkiran di Kota Bandung	Peningkatan jumlah SDM Parkir yang ideal
			Peningkatan kajian mengenai penyelenggaraan parkir di luar badan jalan ( <i>off-street parking</i> ).
			Peningkatan kajian mengenai pemanfaatan teknologi dalam pelayanan parkir.
Peningkatan kajian kerjasama BLUD Parkir dengan pihak - pihak lain			

## BAB 6 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN KEUANGAN

Kebijakan yang diambil dalam pencapaian tujuan lima tahunan ini menitikberatkan kepada kesiapan dari Sumber Daya Manusia perparkiran terutama juru parkir yang berdasarkan hasil identifikasi masih memiliki beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut diantaranya adalah ketidakdisiplinan dalam pengoperasian mesin TPE. Selain itu, ketidakdisiplinan pun datang dari pengguna jasa parkir yang belum transparan mengenai durasi parkir.

Tabel 6-1 Rencana Program dan Pendanaan BLUD Parkir Kota Bandung 2022 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kebijakan dan Program	Indikator	Satuan	Baseline 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						2022		2023		2024		2025		2026	
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
Tujuan: mewujudkan penyelenggaraan perparkiran yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan di Kota Bandung			Mesin parkir yang beroperasi	Unit	247	300		350		400		420		445	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	80,35	76		78		80		82		84	
	Meningkatnya kualitas perangkat perparkiran di Kota Bandung	Kebijakan peningkatan TPE Non Aktif yang diperbaiki	Persentase perangkat TPE yang beroperasi	%	55	67,42	1.590.000.000,00	78,65169	1.500.000.000,00	89,89	1.500.000.000,00	94,38	600.000.000,00	100	750.000.000,00
		Program perbaikan perangkat TPE Non Aktif	Jumlah mesin TPE yang diperbaiki	Unit	N/A	53	1.590.000.000,00	50	1.500.000.000,00	50	1.500.000.000,00	20	600.000.000,00	25	750.000.000,00
	Meningkatnya kualitas pelayanan perparkiran di Kota Bandung dari segi sumber daya manusia dan inovasi penyelenggaraan perparkiran	Kebijakan peningkatan jumlah SDM Parkir yang Ideal	Persentase SDM juru parkir yang ideal	%	N/A	20	76.300.000,00	40	76.300.000,00	60	76.300.000,00	80	76.300.000,00	100	76.300.000,00
		Program pelatihan juru parkir	Persentase juru parkir yang mendapatkan pelatihan	%	N/A	20	34.300.000,00	40	34.300.000,00	60	34.300.000,00	80	34.300.000,00	100	34.300.000,00
		Program pengawasan penyelenggaraan perparkiran	Persentase juru parkir yang membuat laporan harian	%	N/A	100	42.000.000,00	100	42.000.000,00	100	42.000.000,00	100	42.000.000,00	100	42.000.000,00
		Kebijakan perumusan inovasi penyelenggaraan parkir	Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen	N/A	3	450.000.000,00	3	450.000.000,00	3	450.000.000,00	3	450.000.000,00	3	450.000.000,00
		Program kajian perencanaan inovasi penyelenggaraan parkir di luar badan jalan	Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen	N/A	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00
		Program kajian inovasi pemanfaatan teknologi perparkiran	Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen	N/A	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00

Tujuan	Sasaran	Kebijakan dan Program	Indikator	Satuan	Baseline 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						2022		2023		2024		2025		2026	
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
		Program kajian inovasi pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen	N/A	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00
TOTAL ANGGARAN (Rp)							2.116.300.000,00		2.026.300.000,00		2.026.300.000,00		1.126.300.000,00		1.276.300.000,00

## BAB 7 KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai indikator kinerja BLUD Parkir Kota Bandung yang menunjukkan capaian yang akan dicapai oleh BLUD Parkir Kota Bandung dalam rangka mendukung pencapaian sasaran RPJMD. Target indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bandung tahun 2018 - 2023 dapat dilihat pada Tabel 7-1.

Tabel 7-1 Indikator Kinerja BLUD Parkir Kota Bandung yang Mengacu pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bandung

Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2021	Target Capaian Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
Mesin parkir yang beroperasi	Unit	247	300	350	400	420	445
Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	80,35	83,5	85	86,5	88	89,5

## BAB 8 PENUTUP

Rencana Strategis Bisnis BLUD Parkir Kota Bandung disusun dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi khususnya di bidang perparkiran serta untuk menjadi arah dan pedoman pelaksanaan perparkiran di dalam wilayah Pemerintah Kota Bandung. Dokumen ini disusun untuk membantu pencapaian pembangunan Kota Bandung yang dituangkan baik dalam dokumen RPJMD Kota Bandung maupun Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bandung selama 5 tahun mendatang yang mana berisikan mengenai indikator kinerja, target, maupun prediksi anggaran yang akan digunakan dalam rangka mencapai sasaran - sasaran. Dalam rangka mencapai sasaran - sasaran tersebut, maka disusunlah kaidah - kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh elemen yang berada dalam BLUD Parkir Kota Bandung bersama - sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Rencana Strategis Bisnis BLUD Parkir Kota Bandung 2022 - 2026 dengan sebaik - baiknya.
2. Rencana Strategis Bisnis BLUD Parkir Kota Bandung dijabarkan kedalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD Parkir Kota Bandung tahun 2022 s/d 2026 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan menjadi acuan bagi BLUD Parkir Kota Bandung dari tahun 2022 hingga tahun 2026.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Bisnis BLUD Parkir Kota Bandung, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

----

Plt. WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Pejabat Tingkat I  
NIP. 19760604 200604 1 002



## Dinas Perhubungan Kota Bandung

Jalan Pendamping SOR GBLA, Kota Bandung  
[dishub.bandung.go.id](http://dishub.bandung.go.id)

